

**ELIT, *CULTURE CAPITAL*, DAN SABDA RAJA DALAM SUKSESI
KEPEMIMPINAN DIY DI KERATON MAUPUN GUBERNUR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SYARAT KELULUSAN SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD ABDUL RAHIM

NIM : 10370047

PEMBIMBING :

Dr. SUBAIDI, S.Ag, M.Si

**PROGRAM STUDI SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Setelah ditandatanganinya perjanjian giyanti, maka sejak itulah kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri. Kasultanan tersebut dipimpin oleh seorang sultan. Pemimpin kasultanan dikukuhkan berdasarkan budaya patriarki. Sehingga sultan yang memimpin lebih sering seorang laki-laki. Hal yang menjadi polemik saat ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai sultan/raja kesepuluh yang memegang tahta kasultanan tidak memiliki putra mahkota. Tetapi beberapa bulan lalu, Sri Sultan HB X mengukuhkan putri sulungnya sebagai putri mahkota melalui sabda dan dawuh raja. Pengukuhan ini tidak serta merta putri sulungnya mewarisi kedudukan Sultan HB X. Keraton Ngayogyakarta memiliki paugeran yang menjadi dasar cara menentukan siapa penerus tahta Keraton. Paugeran tersebut terbentuk dari adat istiadat dan kebudayaan para leluhur Keraton Ngayogyakarta. Hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti, apakah sabda raja yang dititahkan merupakan bentuk kesepakatan para elit keraton yang berpijak pada *culture capital* dalam suksesi kepemimpinan dan Bagaimana elit keraton membangun *culture capital* dalam suksesi kepemimpinan.

Atas dasar fenomena tersebut penelitian ini menggunakan teori Fungsionalisme dengan pendekatan induktif melalui kritikal analisis dari fenomena sosial politik sosial politik. Fungsionalisme membeberkan bagaimana aktor dalam struktur sistem sosial tatanan kemasyarakatan dapat menjalankan status dan perannya dengan baik, sehingga membentuk keseimbangan dan mendapat pencapaian. Data dari penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada. Dokumen tersebut berupa buku, artikel, jurnal, koran, majalah, ataupun literatur. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif kemudian dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sabda raja bukan kesepakatan para elit keraton. Sabda raja murni keluar dari pribadi raja sendiri tanpa ada pihak internal yang ikut andil berkaitan dengan keluarnya sabda raja. Sabda raja tersebut bertentangan dengan paugeran Keraton yang selama ini berlaku dalam menentukan penerus tahta Keraton. Dalam paugeran Keraton, penerus raja ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu oleh internal Keraton yang memiliki hak. Sabda raja yang bertentangan dengan paugeran keraton dapat disebut sebagai tindakan kesewenang-wenangan. *Culture capital* elit Keraton terbangun berdasarkan aturan keraton/paugeran yang sejak dulu ditetapkan dan diwariskan kepada para elit keraton yang sekarang ini. Elit keraton sekarang berusaha untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada. Sabda raja tersebut juga bertentangan dengan kaidah Islam, karena dalam Islam pemimpin ditentukan melalui musyawarah terlebih dahulu oleh anggota majelis syura / *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sehingga pemimpin yang terpilih memiliki legalitas yang diakui oleh semua orang.

Kata kunci: *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan/Raja, Sabda Raja, Culture Capital, Suksesi Kepemimpinan.*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abdul Rahim

NIM : 10370047

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi: ELIT, CULTURE, CAPITAL, DAN SABDA RAJA
DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN DIY DI
KRATON MAUPUN GUBERNUR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

Yang menyatakan



Muhammad Abdul Rahim

NIM : 10370047



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Abdul Rahim

NIM : 10370047

Judul Skripsi : ELIT, CULTURE, CAPITAL, DAN SABDA RAJA DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN DIY DI KRATON MAUPUN GUBERNUR

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

Pembimbing,

Dr. Subaidi., S. Ag., M.Si.

NIP. 19750517 200501 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-516/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan Judul : ELIT, CULTURE, CAPITAL, DAN SABDA RAJA DALAM SUKSESI
KEPEMIMPINAN DIY DI KERATON MAUPUN GUBERNUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD ABDUL RAHIM
Nomor Induk Mahasiswa : 10370047
Telah diujikan pada : Senin, 29 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Yogyakarta, 23 September 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fâ'	F	ef
ق	qâf	Q	qi
ك	kâf	K	ka
ل	lâm	L	'el
م	mîm	m	'em
ن	Nûn	N	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yâ	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis Ahmadiyyah

C. Ta'Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis jamâ'ah

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamâtul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis â, i panjang ditulis î, dan u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal Rangkap

1. Fathah dan yâ' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wâwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل ditulis *Qaul*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنِّت ditulis *Mu'anna's*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur'ân*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiyâs*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاء ditulis *As-samâ'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zawi al-furûd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islâm* atau *Syaikhul-Islâm*

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

"Barang siapa yang berusaha akan mendapat apa yang diusahakannya"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin..

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, yang selalu mendukung, membimbing, dan mengingatkan akan kewajiban saya. Terimakasih tak terhingga saya ucapkan untuk kedua orang tua saya, ayah, ibu, kalianlah orang tua terhebat dan terkuat yang selalu ada di samping saya. Semoga kalian sehat selalu, diberi umur panjang yang barokah, dan bahagia selalu. Doa ayah ibu selalu saya rindukan untuk mengiringi langkah suksesku.

Kedua, karya ini saya persembahkan untuk almamater saya, UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta. terimakasih telah menjadi madrasah terbaik dalam menuntut ilmu. Smoga ilmu yang kudapat dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat saya.

Ketiga, karya ini saya persembahkan untuk teman-teman seperjuangan saya yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka. Terimakasih..

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد أن لا إله إلا الله و اشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة
والسلام على أشرف الأ نبياء و المرسلين سيدنا و مولا نامحمد وعلى اله وصحبه

اجمعين. اما بعد

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah, hikmah, dan najah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Agung kita Muhammad SAW yang telah membawa kita umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern yang terang akan peradaban, ilmu yang melimpah, dan berteknologi canggih.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Preferensi Masyarakat DIY Terhadap GKR Hemas penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

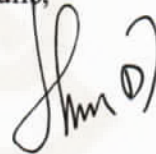
1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Oman Fathurohman, SW., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah/Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, MA., selaku dosen pembimbing akademik selama menempuh program strata satu (S1) di jurusan Siyasah/Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Subaidi, S. Ag., M. Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang mana atas bimbingan dan arahan beliau penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap dosen program studi Siyasah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk penulis dalam menempuh pendidikan jenjang strata satu.
7. Segenap karyawan program studi Siyasah dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam hal teknis ketika menempuh pendidikan dan ketika akan melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada mereka semua penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih. Penulis berdoa semoga semua yang telah mereka diberikan kepada penulis bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT atas amal jariah yang telah diberikan kepada penulis. Amin.

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

Penulis,



Muhammad Abdul Rahim

NIM: 10370047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5

E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TEORI DAN KERANGKA KONSEP TEORI FUNGSIONALISME TALCOTT PARSONS SERTA SUKSESI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM	15
A. Teori Fungsionalisme	15
B. Kerangka Konsep Teori Fungsionalisme.....	18
C. Suksesi Kepemimpinan Dalam Islam.....	25
BAB III SABDA RAJA SEBAGAI AKUMULASI ELIT, <i>CULTURE CAPITAL</i> DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN DIY	30
A. Posisi Raja Dalam Sistem Politik dan Budaya Keraton	30
B. Sabda Raja Dalam Keraton Yogyakarta.....	33
C. Peran Elit Keraton Dalam Suksesi Politik Di Yogyakarta	39
D. <i>Culture capital</i> (modal budaya) Yang Menjadi Pijakan Obsesi Dalam Kepemimpinan.....	42
BAB IV ANALISIS SABDA RAJA SEBAGAI AKUMULASI ELIT, <i>CULTURE</i> <i>CAPITAL</i> DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN DIY	46
A. Posisi Raja Dalam Sistem Politik Dan Budaya Keraton	46
B. Sabda Raja Dalam Keraton Yogyakarta.....	54
C. Peran Elit Keraton Dalam Suksesi Politik Di Yogyakarta	64

D. <i>Culture Capital</i> (Modal Budaya) Yang Menjadi Pijakan Obsesi Dalam Kepemimpinan	69
E. Suksesi Kepemimpinan Dalam Islam	73
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	
Curriculum Vitae Penyusun Skripsi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah perjanjian Giyanti terlaksana, maka wilayah Mataram terbagi menjadi dua wilayah yakni kasunanan Surakarta dan kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Akibat adanya perjanjian Giyanti tahun 1755 M inilah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh seorang Pangeran Mangkubumi. Nama kecil pangeran Mangkubumi adalah B.R. M (Bendoro Raden Mas) Sudjono, lahir pada Rabu Pon tanggal 4 Agustus 1717 M. Beliau putra dari Sri Susuhunan Prabu Amangkurat IV.¹ Pangeran Mangkubumi inilah yang menjadi Raja pertama di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar *Ngarsa Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Khaliftullah Ngabdurahman Sayidin Panatagama Inkgang Jumeneng Ing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat Inkgang Jumeneng Sepisan.*²

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan kerajaan Islam, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Kasultanan pasti didasarkan pada

¹Ahmad Sarwono bin Zahir, *Sabda Raja HB X Dalam Timbangan Revolusi Karakter Istimewa Berdasar Yang Terlupakan : pendidikan Karakter Adiluhung Sri Sultan HB I Pesan Moral Masjid Gedhe Keraton Ngayogyakarta Figur Ideal Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal 16

² Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik*, (Yogyakarta: GalangPress, 2011), hal. 31

ketentuan Islam. Masa pemerintahan Sri Sultan HB IX dimulai setelah beliau dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamangku Buwono IX pada tanggal 18 Mei 1940. Perjuangan Sultan HB IX masih sekitran pengusiran penjajah dari tanah kasultanan. Selain itu Sultan HB IX juga menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan menjadi Raja di Kasultanan Ngayogyakarta, Sultan HB IX tetap berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Adapun jabatan yang pernah diembannya setelah Indonesia merdeka, antara lain: kepala dan Gubernur Militer DI Yogyakarta (1945 M), 6 kali menjadi Menteri dari Kabinet Syahrir 1946 M hingga kabinet Natsir 1951 M, menteri/ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (5 Juli 1959 M), wakil perdana Menteri Bidang Ekonomi (1966 M), dan menjadi wakil Presiden Indonesia (1973-1978 M)³.

Sejak berdirinya, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sudah menegakan syariat Islam yang dikombinasikan dengan budaya kultural masyarakat Yogyakarta dari leluhur-leluhur sebelumnya. Dari budaya kultural tersebut Keraton Ngayogyakarta memiliki pakem atau aturan hukum keraton yang dibuat dan ditaati oleh para leluhur dan para penerus keraton. Pakem atau aturan hukum tersebut lebih dikenal dengan istilah Paugeran.

Salah satu Paugeran berisi bahwa, pemimpin Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah seorang laki-laki. Baru-baru ini, Sri Sultan HB X sebagai penerus generasi kesepuluh mengeluarkan sabda raja yang membuat pro kontra bermunculan. Sabda raja tersebut berkaitan dengan penggantian nama GKR Pambayaun putri sulung Sri Sultan HB X menjadi GKR Mangkubumi.

³ Ahmad Sarwono bin Zahir, *ibid.*, hal 65

Penggantian nama GKR Pambayun menjadi GKR Mangkubumi membawa konsekuensi bahwa GKR Pambayun adalah penerus tahta kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat selanjutnya. Hal ini tentunya menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan. Pengukuhan GKR Pambayun menjadi GKR Mangkubumi bertolak belakang dengan paugeran yang ada. Tradisi dalam paugeran selama ini, tidak ada seorang putri yang memimpin kesultanan.

Sikap Sri Sultan HB X mendapat kritikan dari pihak keluarga sendiri. Para adik Sultan kecewa dengan sikap Sultan yang tidak mengajaknya berdiskusi mengenai suksesi kepemimpinan selanjutnya. Mereka selaku keluarga Sultan juga mempunyai hak untuk mengikuti musyawarah berkaitan dengan suksesi pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun, mengeluarkan sabda merupakan salah satu hak yang di miliki oleh Sri Sultan HB X. Disinilah timbul suatu permasalahan berkaitan dengan suksesi kepemimpinan Kasultanan Ngayogyakarta.

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan elit, *culture capital*, dan sabda raja dalam suksesi kepemimpinan di DIY baik Keraton maupun Gubernur.

B. Pokok Masalah

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sabda raja pada tanggal 30 April 2015 sebagai bentuk kesepakatan para elit keraton yang berpijak pada *culture capital* dalam suksesi kepemimpinan ?
2. Bagaimana elit keraton membangun *culture capital* dalam suksesi kepemimpinan ?
3. Bagaimana pandangan Siyash Islamiyah mengenai suksesi kepemimpinan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan bentuk kesepakatan para elit keraton yang berpijak pada *culture capital* dalam suksesi kepemimpinan
- b. Menjelaskan cara elit keraton membangun *culture capital* dalam suksesi kepemimpinan
- c. Menjelaskan suksesi kepemimpinan dalam perspektif Siyash Islamiyah.

2. Kegunaan

a. Secara Ilmiah

Penelitian ini berguna sebagai informasi dan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaca.

b. Secara Terapan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian lain dan diharapkan dapat digunakan sebagai informasi oleh peneliti lainnya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

D. Telaah Pustaka

Pustaka yang membahas mengenai fenomena sabda raja tanggal 30 April 2015 lalu belum ada, namun ada beberapa buku dan literatur yang membahas tentang Sri Sultan Hamengkubuwono X, sabda raja, dan suksesi kepemimpinan. Buku dan jurnal tersebut sebagai berikut :

Buku karya Ahmad Sarwono bin Zakir dengan Judul Sabda Raja HB X Dalam Timbangan Revolusi Karakter Istimewa Berdasar Yang Terlupakan : pendidikan Karakter Adiluhung Sri Sultan HB I Pesan Moral Masjid Gedhe Keraton Ngayogyakarta Figur Ideal Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Buku ini membahas mengenai asal mula Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, raja-raja yang memimpin, nilai karakter adiluhung yang ada di Keraton, serta ditulis salah

satu dawuh dan perkenannya Raja HB X berkaitan dengan perintah dan ajakan I'tikaf.

Buku dengan judul Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat karya Y.B Margantoro, dkk. Buku ini membahas siapakah sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X, bagaimanakah sepak terjang beliau sebelum dan sesudah menerima tahta dari ayahnya, yakni Sri Sultan HB IX.

Skripsi Nora Hilma Sari yang berjudul analisis pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah di sahkannya undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan melalui mekanisme penetapan yang secara prosedural dilakukan oleh DPRD DIY tanpa meninggalkan asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Skripsi karya Shella Marcelina yang berjudul Penetapan Gubernur DIY menurut Pandangan Partai Demokrat. Skripsi ini penulis menjelaskan mengenai pandangan dan sikap partai demokrat terhadap penetapan Gubernur DIY bahwasannya penetapan Gubernur DIY harus mempertimbangkan pada konteks sekarang ataupun masa depan, bukan hanya dengan sosok seorang Hamengkubuwono X atau landasan historis saja.

Skripsi karya Alvin Noor Sahab Rizal yang berjudul Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X tentang sukseksi kekuasaan dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Skripsi ini penulis menjelaskan mengenai tipologi Irfani sebagai pemikiran Sultan Hamengku Buwono X dalam memunculkan sabda raja pada

tanggal 30 April 2015 dan dawuh raja 5 Mei 2015 serta membahas mengenai pandangan siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan putri mahkota sebagaimana dalam sabda raja.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena, teori digunakan untuk memandu kemana arah penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan membedah masalah menggunakan teori fungsionalisme. Banyak ahli mendefinisikan mengenai teori fungsionalisme tetapi dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendapat Talcott Parsons.

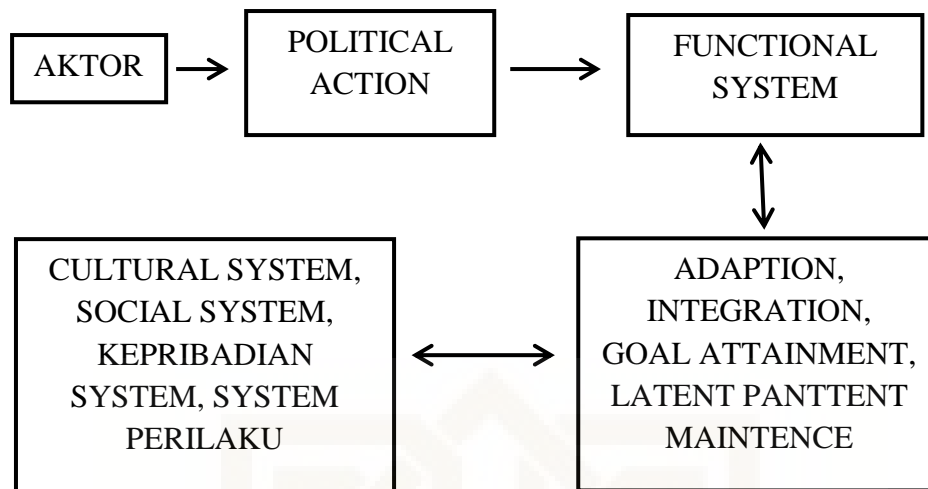
Teori fungsional berkaitan erat dengan sebuah struktur yang tercipta dalam masyarakat. Teori fungsionalisme mempelajari struktur dalam masyarakat seperti halnya perkembangan manusia dalam strukturasi organisme. Hal yang sama terjadi pada sebuah tatanan kesatuan dalam masyarakat. Jika salah satu atau dua individu tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka akan sangat mengganggu sistem kehidupan. Penekanan yang terjadi pada teori fungsionalisme bersumber pada bagaimana dalam perkembangan tersebut mencakup keragamannya, tercipta sebuah keseimbangan (*equilibrium*) atau *dynamic equilibrium* (keseimbangan berjalan). Notebene, berasal dari fungsi dan peran masing – masing individu yang ada dalam masyarakat. Parsons (1957) menyebutkan, keseimbangan dapat tercipta dengan

Adaptation (adaptasi), *Goals* (tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latent Pattern Maintenance* (pemeliharaan pola – pola).⁴

Fungsionalisme berjalan melalui individu – individu (*individu Act*) sebagai aktor dengan menjalankan fungsi dan perannya masing – masing melalui bentuk adaptasi terhadap subsistem fungsionalisme, yang menghasilkan sebuah tindakan (unit aksi). Dari unit aksi inilah kemudian terjadi sistem aksi (*act system*) dimana masyarakat telah menemukan tujuan dari aksi tersebut. Sehingga terbentuklah sebuah tatanan masyarakat dengan keunikannya tersendiri.

Parson mendesain skema untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teoritisnya. Cara menggunakan skema Parsons dalam menyusun struktur sistem tindakan adalah sebagai berikut: *organisme perilaku* adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. *Sistem kepribadian* melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem social menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, *system cultural* melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

⁴ George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hal 409



Gambar 1.0 Kerangka Konsep Fungsional Struktural

Empat sistem tindakan itu tidak muncul dalam kehidupan nyata, keempat itu lebih merupakan peralatan analisis untuk menganalisis kehidupan nyata. Konsep Parsons tentang sistem social berawal pada interaksi tingkat makro antara ego dan alter-ego yang didefinisikan sebagai bentuk system social paling mendasar. Ia sedikit sekali mencurahkan perhatian untuk menganalisis tingkat makro, meski ia menyatakan bahwa gambaran system interaksi ini tercermin dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks yang dilakukan oleh system social. Definisi sistem sosial menurut Parson terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk “mengoptimalkan kepuasan”, yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term system symbol bersama yang terstruktur secara kultural. Definisi ini mencoba

menetapkan system social menurut konsep-konsep kunci dalam karya Parson yakni aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan dan kultural.

Meski Parsons berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai sebuah simbol interaksi, namun ia tak menggunakan interaksi sebagai unit fundamental dalam studi tentang sistem sosial. Justru ia menggunakan *status-peran* sebagai unit dasar dari sistem. Konsep ini bukan merupakan satu aspek dari aktor atau aspek interaksi, tetapi lebih merupakan komponen struktural dari sistem sosial. Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya untuk sistem yang lebih luas. Aktor tidak dilihat dari sudut pikiran dan tindakan, tetapi dilihat tak lebih dari sebuah kumpulan beberapa status dan peran.

Sistem kultural yang dibayangkan Parson adalah sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial. Jadi, kultur dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur, yang menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah terinternalisasikan, dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial.

Dalam penelitian ini, Sri Sultan HB X dan masyarakat DIY membentuk suatu sistem sosial yang mana hubungan diantara keduanya adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Sri Sultan HB X dan Masyarakat DIY menjadi aktor yang memiliki peran dan fungsi masing-masing secara terstruktur. Sistem sosial terbentuk antara Sri Sultan HB X dengan masyarakat

DIY karena adanya keseimbangan yang terjaga diantara aktor. Keseimbangan tersebut akibat adanya hubungan atau pola interaksi yang baik dalam menjalankan masing-masing peran. Keseimbangan dipengaruhi berbagai faktor yang berkembang dilingkungan para aktor. Keseimbangan ini pun dapat terganggu apabila salah satu atau kedua aktor merusak hubungan keseimbangan yang sudah tercipta dalam sistem sosial.

Sistem sosial yang terbentuk antara Sri Sultan HB X dengan rakyat DIY terdapat sistem kultural yang hidup. Karena pada dasarnya Yogyakarta adalah provinsi yang berbasis pada kebudayaan, maka banyak budaya yang berkembang. Pola kehidupan Sri Sultan HB X erat kaitanya dengan budaya jawa yang mengandung norma-norma dan nilai-nilai. Dan masyarakat DIY pun patuh dengan norma dan nilai yang terbentuk dari pola kebudayaan, sehingga terbentuk keseimbangan. Dengan demikian keteraturan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dapat tercipta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵ Adapun metode dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar dari sebuah fenomenasosial.⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumentasi kualitatif, sehingga sumber data dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dan yang mendukung dari pokok permasalahan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama. Sumber tersebut berasal dari:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Karena penelitian ini adalah dokumentasi kualitatif, maka data itu dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang ada, yakni berupa buku, artikel, jurnal, koran, majalah, ataupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2010), hlm.3

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 7

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi singkat dengan masyarakat Yogyakarta. Hasil wawancara tersebut berisi pendapat masyarakat yang nantinya akan digunakan sebagai data penguat dari penelitian.

3. Metode Pendekatan Analisis Data Yang Digunakan

Metode pendekatan analisa data yang digunakan yakni dengan metode pendekatan induktif melalui kritikal analisis dari fenomena sosial politik yang terjadi. Metode pendekatan analisa induktif adalah metode pendekatan dengan mengungkapkan fakta-fakta yang ada dalam pengamatan peneliti, kemudian dapat ditarik kesimpulan dari pengamatan tersebut. Proses analisis induktif menghimpun dan memadukan data khusus menjadi kesatuan informasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, pendahuluan menguraikan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas teori dan kerangka konsep teori fungsionalisme Talcott Parsons.

Bab ketiga menyajikan data yang diperoleh ketika melakukan penelitian. Memaparkan sabda raja sebagai akumulasi para elit dan *culture capital* dalam suksesi kepemimpinan.

Bab keempat berisi analisis sabda raja dalam konteks elit dan *culture capital* elit politik keraton serta dalam Islam.

Bab kelima yakni penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari penjabaran analisa data sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah diuraikan pada bab pertama. Saran berupa masukan untuk peneliti atas penelitiannya atau kepada pihak yang terkait dalam tema penelitian ini.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA KONSEP TEORI FUNGSIONALISME TALCOTT PARSONS SERTA SUKSESI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

A. TEORI FUNGSIONALISME

Dalam membongkar persoalan mengenai elit, *culture capital* dan sabda raja dalam suksesi kepemimpinan DIY ini akan menggunakan menggunakan Teori fungsional dari Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.¹

¹ Bernard Raho,SVD , *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 48

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.²

Inti pemikiran Parsons ditemukan didalam empat sistem tindakan ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya, berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya. Problem Hobbesian tentang keteraturan yang dapat mencegah perang sosial semua lawan semua – menurut Parsons tak dapat dijawab oleh filsuf kuno. Parsons menemukan jawaban problem didalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut:³

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.

² Nasikum, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 9

³ George Ritzer, hal. 123

7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.

Teori fungsionalisme memberikan tekanan pada suatu tatanan yang teratur dan tidak mengindahkan adanya konflik yang mengarah pada ketidakteraturan. Pendekatan fungsionalisme beranggapan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan atau sistem yang terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling ketergantungan. Oleh karena masyarakat merupakan suatu sistem maka apabila terjadi perubahan dalam salah satu bagian (subsistem) akan memberikan pengaruh pada yang lain.

Prinsip dasar pemikiran Talcott Parsons adalah bahwa (1) tindakan diarahkan pada tujuannya; (2) tindakan terjadi dalam suatu situasi atau kondisi yang unsure-unsurnya sudah pasti, sedang unsure-unsur yang lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, serta (3) secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa tindakan atau perilaku itu dipandang sebagai satuan kenyataan social yang terkecil dan mendasar. Adapun unsure-unsur yang bersifat dasar dari satuan perilaku atau tindakan itu berupa alat, tujuan, situasi atau kondisi dan norma.⁴

⁴ Wagiyo, dkk, *Teori Sosiologi Modern*, (Banten : Universitas Terbuka, 2012), hlm. 2.13

Talcott Parson mengemukakan tentang konsep perilaku atau tindakan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. (1) Aktor sebagai individu, (2) Aktor tersebut mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai, sebagaimana ditentukan dalam sistem budaya, (3) Tindakan diambil dalam suatu situasi dan kondisi. Hal yang terdapat dalam situasi ini adalah peralatan, antara lain fasilitas, alat-alat dan sumber daya, sedangkan yang termasuk kondisi yaitu rintangan yang ditemui untuk mencapai tujuannya. Aturan-aturan ini menentukan tujuan akhir dan bagaimana perilakunya, dan harapan normatif harus dipenuhi oleh aktor maupun yang termotivasi untuk mencapai tujuannya. Tampak dengan jelas bagaimana norma ditempatkan pada pusat teori aksi Parson dan mengapa Parson menganggap sistem budaya melegitimasi keduanya sebagai suatu yang utama.⁵

B. KERANGKA KONSEP TEORI FUNGSIONALISME

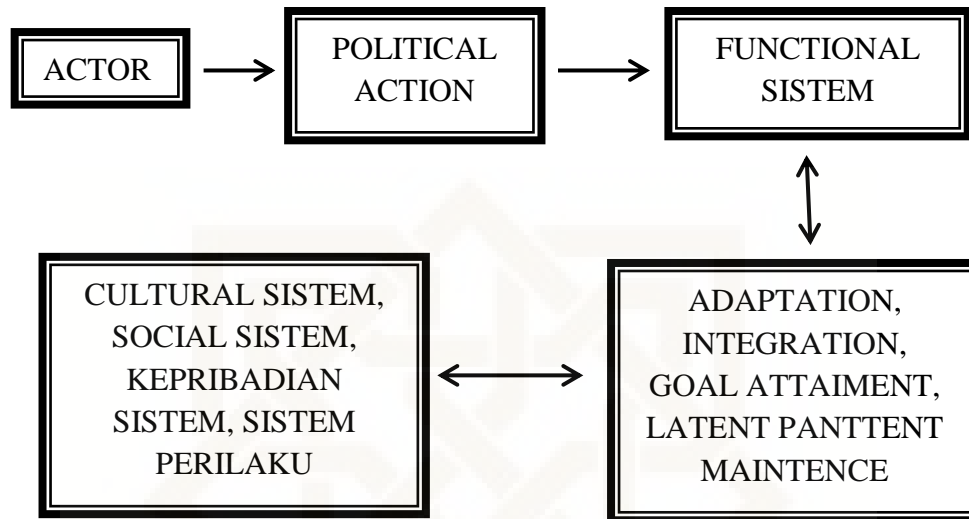
Pada intinya Parsons menjelaskan teori fungsionalisme kepada suatu pemahaman mengenai sistem yang mengacu kepada konsep equilibrium dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya ada fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem untuk kelestarian suatu sistem, yaitu (1) yang berhubungan dengan

⁵ Veeger, J.K., *Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 200

kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem pada saat berhubungan dengan lingkungannya; (2) yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sarana alat yang perlu dalam mencapai tujuan. Berdasarkan dua pernyataan itu Parsons mencetuskan pemikiran mengenai adanya empat fungsi utama dalam hubungannya dengan sistem itu yaitu adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*Goal Attainment*), integrasi (*integration*) dan keadaan laten (*Laten Pattern Maintenance*). Empat persyaratan fungsional yang mendasar tersebut berlaku untuk semua sistem yang ada. Empat fungsi tersebut terpatri secara kokoh dalam setiap dasar yang hidup pada seluruh tingkat organism tingkat perkembangan evolusioner sebagai keteraturan yang harus dimiliki dan dijalankan setiap masyarakat.⁶

Parson mendesain empat syarat fungsional ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teoritisnya. Cara menggunakan skema dari Parson dalam menyusun struktur sistem tindakan, *organisme perilaku* adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. *Sistem kepribadian* melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. *Sistem social* menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, *sistem kultural* melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

⁶ Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali, 1984), hlm,182



Gambar 1.0 Kerangka Konsep Fungsional

Alur skema diatas penjelasannya mulai dari Aktor yang mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai sebagaimana ditentukan dalam sistem budaya, disini bisa diartikan bahwa Sultan Hamengku Buwono X berperan sebagai aktor. Dikeluarkannya Sabda Raja yang juga bisa disebut dengan *political action* sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagaimana ditentukan dalam sistem budaya. Menurut Parson, persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dan norma ke dalam sistem ialah dengan sosialisasi dan internalisasi. Pada proses sosialisasi yang sukses, nilai dan norma sistem sosial itu akan diinternalisasikan. Artinya nilai dan norma sistem sosial ini menjadi bagian kesadaran dari aktor tersebut. Akibatnya ketika si aktor sedang mengejar kepentingan mereka maka secara langsung juga sedang mengejar sistem sosialnya. Nilai dan norma itu akan

diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya sebagai suatu proses dalam sistem kepribadian agar membentuk individu sesuai yang diinginkan dalam sistem kultural.

Dalam perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif- imperatif fungsional agar sebuah sistem bisa bertahan, yaitu pertama adaptasi (*adaptation*) dilaksanakan oleh sistem perilaku dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sedangkan fungsi pencapaian tujuan (*Goal attainment*) difungsikan oleh sistem kepribadian dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya. Fungsi integrasi (*integration*) dilakukan oleh sistem sosial, dan keadaan laten (*Latent Pattern Maintenance*) difungsikan sistem kultural. Cara sistem kultural bekerja adalah dengan menyediakan aktor, seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak. Tingkat integrasi terjadi dengan dua cara, pertama : masing- masing tingkat yang paling bawah menyediakan kebutuhan kondisi maupun kekuatan yang dibutuhkan untuk tingkat atas. Sedangkan tingkat yang di atasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya.

Empat sistem tindakan itu tidak muncul dalam kehidupan nyata, keempat itu lebih merupakan peralatan analisis untuk menganalisis kehidupan nyata. Konsep Parsons tentang sistem sosial berawal pada interaksi tingkat makro antara ego dan alter-ego yang didefinisikan sebagai bentuk sistem sosial paling mendasar. Ia sedikit

sekali mencurahkan perhatian untuk menganalisis tingkat makro, meski ia menyatakan bahwa gambaran sistem interaksi ini tercermin dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks yang dilakukan oleh sistem sosial. Definisi sistem sosial menurut Parson terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk “mengoptimalkan kepuasan”, yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Definisi ini mencoba menetapkan sistem sosial menurut konsep-konsep kunci dalam karya Parson yakni aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan dan kultural.

Meski Parsons berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai sebuah simbol interaksi, namun ia tak menggunakan interaksi sebagai unit fundamental dalam studi tentang sistem sosial. Justru ia menggunakan *status-peran* sebagai unit dasar dari sistem. Konsep ini bukan merupakan satu aspek dari aktor atau aspek interaksi, tetapi lebih merupakan komponen struktural dari sistem sosial. Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya untuk sistem yang lebih luas. Aktor tidak dilihat dari sudut pikiran dan tindakan, tetapi dilihat tak lebih dari sebuah kumpulan beberapa status dan peran.

Didalam analisisnya atas sistem sosial, Parson terutama tertarik pada komponen-komponen strukturalnya, selain memerhatikan peran-status, Parson juga

tertarik kepada komponen-komponen sistem social berskala besar seperti kolektivitas, norma-norma dan nilai-nilai. Akan tetapi, didalam analisisnya atas sistem sosial, Parson tidak hanya sebagai seorang strukturalis tetapi juga seorang fungsionalis. Oleh karena itu, dia menggambarkan sejumlah prasyarat fungsional suatu sistem sosial, yaitu⁷ :

1. Terstruktur, dapat beroperasi dengan baik bersama sistem lain.
2. Didukung sebelumnya oleh sistem lain, agar dapat bertahan hidup.
3. Signifikan memenuhi proporsi kebutuhan aktor-aktornya.
4. Menimbulkan partisipasi yang memadai dari anggotanya.
5. Memiliki kontrol minimum terhadap perilaku yang berpotensi merusak.
6. Memerlukan bahasa agar bertahan hidup.

Sistem kultural yang dibayangkan Parson adalah sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial. Jadi, kultur dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur, yang menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah terinternalisasikan, dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial.

Dalam prespektif fungsionalis ini suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat.

⁷ George Ritzer, hal. 412

Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan. Sebagai para juru bicara yang terkemuka, setiap kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu dan terus-menerus, karena hal itu fungsional.

Perubahan sosial mengganggu keseimbangan masyarakat yang stabil, namun tidak lama kemudian terjadi keseimbangan baru. Bila suatu perubahan sosial tertentu mempromosikan suatu keseimbangan yang serasi, hal tersebut dianggap fungsional, bila perubahan sosial tersebut mengganggu keseimbangan hal tersebut merupakan gangguan fungsional, bila perubahan sosial tidak membawa pengaruh maka hal tersebut tidak fungsional. Para sosiolog yang memakai prespektif evolusioner, mencari pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda. Untuk mengetahui apakah ada urutan umum yang dapat ditemukan.

Talcot Parson menganalisis masyarakat sebagai suatu sistem social. Inti dari suatu sistem adalah hubungan antara bagian yang membentuk satu keseluruhan yaitu berupa organism social. Karena organism social merupakan suatu sistem, maka bagian dari organism social. Karena organisme sosial merupakan suatu sistem, maka bagian dari organism sosial (masyarakat) tersebut berusaha untuk menetralsir gangguan atau mempertahankan keseimbangan. Parson memperkenalkan dua konsep yang berkenaan dengan sistem social yaitu sebagai berikut:

1. Konsep *Fungsi*, yang mana dimengerti sebagai sumbangan kepada keselamatan dan ketahanan sistem sosial.
2. Konsep *pemeliharaan keseimbangan*, dimana hal ini merupakan ciri utama dari tiap sistem sosial.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa parson melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang mana tiap unsur saling mempengaruhi, saling membutuhkan, dan bersama-sama membangun totalitas yang ada, serta bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan. Teori fungsional melihat manusia dalam masyarakat sebagai ditandai oleh dua tipe kebutuhan dan dua jenis kecenderungan bertindak. Demi kelanjutan hidupnya, manusia harus bertindak terhadap lingkungan, baik dengan cara menyesuaikan diri pada lingkungan itu atau menguasai dan mengendalikannya. Teori fungsionalisme memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-harinya dalam lingkungan alam.

C. SUKSESI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Suksesi dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai penggantian (terutama di lingkungan pimpinan tertinggi negara) karena pewarisan; proses pergantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Lantas bagaimana pandangan Islam mengenai suksesi kepemimpinan ?. berikut ini akan dibahas suksesi kepemimpinan dalam Islam.

⁸ <http://kbbi.web.id/suksesi>, diakses pada tanggal 13 November 2015 pukul 9.39 WIB

Dalam Islam istilah pemimpin dikenal dengan istilah Khalifah. Menurut bahasa, Khalifah (خليفة *Khalīfah*) merupakan mashdar dari *fi'il madhi* khalafah, yang berarti : menggantikan atau menempati tempatnya. Sedangkan dalam pengertian syariah, Khalifah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad SAW (setelah beliau wafat) dalam kepemimpinan Negara Islam. Khalifah juga sering disebut sebagai *Amīr al-Mu'minīn* (أمير المؤمنين) atau pemimpin orang yang beriman.

Sejak meninggalnya Rasulullah SAW kita mengenal adanya empat (4) khalifah (pemimpin umat Islam) yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Empat (4) pemimpin pengganti Rasulullah tersebut kita kenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan wasiat apapun berkaitan dengan penggantian pemimpin umat Islam setelah beliau wafat. Oleh karena itu, suksesi pemilihan empat (4) Khulafaur Rasyidin dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi saat itu. Suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ada yang dilakukan dengan cara dibaiat (*bil bai'at*) karena musyawarah dan karena penunjukan khalifah sebelumnya (*bil istikhlaf*).

Adapun khalifah yang dibaiat dengan musyawarah diantaranya Abu Bakar as-Siddiq dan Utsman binAffan. Abu Bakar di baiat setelah adanya perdebatan antara kaum muhajirin dan kaum anshar. Perdebatan itu terjadi karena kedua kaum beranggapan sama, bahwa pengganti Rasulullah SAW hendaknya berasal dari kaum

mereka. Namun perdebatan tersebut hanya sementara, dan pada akhirnya kedua pihak sepakat membaiaat Abu Bakar as-Siddiq menjadi pememimpin umat Islam meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Sedangkan Utsman bin Affan di baiat setelah diadakan musyawarah oleh enam (6) enam orang sahabat, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, az-Zubair bin al- Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf.⁹

Sedangkan khalifah yang dibaiat karena adanya penunjukan dan wasiat adalah khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum wafatnya, khalifah Abu Bakar sempat menuliskan wasiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk meneruskan kepemimpinannya, memimpin umat Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib dibaiat setelah adanya desakan dari pengikutnya. Awalnya Ali bin Abi Thalib tidak mau menerima jabatan tersebut, namun adanya desakan dari para pengikutnya akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia di baiat melanjutkan kepemimpinan Ustman bin Affan.

Berdasarkan pengalaman sahabat Rasulullah SAW, proses suksesi pemimpin hendaknya dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Seperti yang telah di Firmankan Allah SWT :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ¹⁰

⁹ Al-Hafizh Ibnu Katsir, *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung*, (Jakarta:Darul Haq, 2013), Cet. IX, Hlm. 437

¹⁰ Asy-Syura (42) : 38

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa yang dimusyawarahkan adalah al-Amar, yang secara sederhana kata "*amar*" dapat diartikan dengan urusan, persoalan atau permasalahan. Sedangkan kata "*amruhum*" berarti urusan mereka. Urusan itu bukan urusan individu, kelompok atau golongan elit melainkan urusan mereka bersama dan urusan rakyat secara keseluruhan. Selanjutnya kata "*syūrā bainahum*" harus diputuskan melalui diskusi dan konsultasi bersama bukan diputuskan oleh seorang individu atau golongan elite yang tidak mereka pilih atau setuju.¹¹

Ayat di atas menyatakan bahwa kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyu' kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan disamping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambung baik nafkah wajib maupun sunnah.¹²

Orang yang melakukan musyawarah dikenal dengan sebutan *ahl al-hall wa al-aqd*. Secara bahasa *Ahl al-hall wa al-'Aqd* memiliki pengertian "orang-orang yang

¹¹ Fazlur Rahman, *Masalah-Masalah Teori Politik*, hal. 127

¹² Quraish shihab, *Al-Misbah*, jilid 12, hal.. 511-513

melepas dan mengikat” atau ”orang yang dapat memutuskan dan mengikat”. Sedangkan menurut para Ahli fiqih siyasah, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.¹³

Adapun syarat menjadi anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sebagai berikut: pertama, Adil. Kedua, Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan tersebut dapat mengetahui siapa saja yang layak menjadi khalifah dan mampu menciptakan produk undang-undang yang berkualitas. Ketiga, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* harus terdiri dari para pakar manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk menjadi khalifah.¹⁴ Sedangkan menurut al-Mawardi syarat menjadi *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah sebagai berikut: pertama, Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya. Kedua, memiliki pengetahuan tentang orang berhak menjadi imam dan persyaratan – persyaratannya. Ketiga, Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling mampu tentang kebijakan – kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hal.138

¹⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h.109

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dibahas pada bab I sampai pada bab V dapat ditarik kesimpulan bahwa sabda raja bukanlah bentuk kesepakatan para elit keraton. Sabda raja murni dari raja langsung yang sumbernya dari pribadi Sultan sendiri. Hal ini terbukti dari *rayi dalem* (adik sultan) ada yang tidak mengetahui ketika sabda raja itu dikeluarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sabda raja dalam mengukuhkan putri sulungnya sebagai putri mahkota bertentangan dengan paugeran Keraton Ngayogyakarta. Sabda raja tersebut menimbulkan kesan kesewenang-wenangan sikap raja dalam menentukan penerus tahta. Meskipun demikian, Saba raja merupakan titah raja yang kedudukannya paling tinggi. Sehingga dalam fenomena ini terjadi tumpang tindih antara sabda raja dan paugeran Keraton.

Para elit keraton terdahulu membangun *Culture Capital* berdasarkan dari tradisi serta kebudayaan yang dianggap baik dan sesuai dengan keadaan Keraton. Keputusan-keputusan dalam mengatasi permasalahan saat itu menjadi adat yang dapat di jadikan paugeran. Elit keraton yang sekarang memegang jabatan dalam keraton hanya meneruskan, menjaga, dan melestarikan tradisi yang telah ada turun temurun leluhur mereka. Apabila sabda raja melenceng dari paugeran, maka raja

di anggap bukan raja di kasultanan Ngayogyakarta. Padahal sabda raja dikelurkan tentu untuk kebaikan rakyatnya, karena Sultan HB X punya tekat kuat berkaitan dengan wasiat yang ditinggalkan ayahnya Sultan HB IX untuk tetap mengutamakan rakyat. Prinsip sultan HB X dan Sultan HB IX adalah tahta untuk rakyat.

Dalam Islam suksesi kepemimpinan itu sebaiknya dimusyawarahkan dengan para anggota majelis syura / *Ahl al-hall wa al-'Aqd*. Sehingga kepemimpinan memiliki legalitas yang diakui oleh semua orang. Suksesi kepemimpinan dengan cara penunjukan dapat dianggap sah, apabila penunjukan tersebut didasarkan kepada kemaslahatan umat. Sabda raja tentang penerus tahta Keraton memang tanpa melalui musyawarah dengan pihak yang memiliki wewenang seperti misalnya kerabat Keraton. Tetapi menurut Islam dapat dianggap sah karena salah satu pertimbangan dikeluarkannya sabda tersebut demi kemaslahatan masyarakat DIY.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran kepada :

1. Masyarakat harus aktif mengikuti setiap perkembangan masalah keistimewaan. Siapapun yang memegang tahta Kasultanan Yogyakarta, masyarakat tetap harus mengawal keistimewaan Yogyakarta.
2. Pemertintah daerah dan pemerintah pusat agar segera merampungkan undang-undang keistimewaan Yogyakarta. meskipun keraton

Yogyakarta memiliki aturan hukum sendiri tetapi Yogyakarta bergabung dalam NKRI sehingga memiliki hak atas kepastian dalam undang-undang. Terlebih Yogyakarta dinobatkan sebagai daerah istimewa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Kementrian Agama RI, Syamil Quran, Bandung: Sygma, 2013

B. Buku Fiqih

Abdul Khaliq, Farid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta : Amzah, 2005

Shihab, Quraish, *Al-Misbah*, Jilid 12

C. Buku Sosial dan Politik

al-Ala al-Maududi, Abu, *Khilafah dan Kerajaan*, Karisma : Bandung, 2007

Artha, Arwan Tuti, *Laku Spiritual Sultan Menuju Langkah Raja Jawa Menuju Istana*, Yogyakarta : Galang Press, 2009

Baskoro, Haryadi dan Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik*, Yogyakarta: GalangPress, 2011

Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

Dwiyanto, Joko, *Kraton Yogyakarta Sejarah, Nasionalisme dan Teladan Perjuangan*, Yogyakarta : Paradigma, 2009

Gelderen, Heine, *Konsepsi tentang Negara dan Kedaulatan Raja di Asia Tenggara*, Jakarta : Rajawali, 1982

Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

Ibnu Katsir, Al-Hafizh, *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung*, Jakarta: Darul Haq, 2013, Cet. IX

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Jenkins, Ricard, *Membaca pikiran Pierre Bourdieu*, Kreasi Wacana Pers: 2004

Kartodirdjo, Sartono, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1984

Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta : Rajawali, 1984

Margantoro, Y.B, dkk, *Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat*, Jakarta: Grasindo, 1999

Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Kanisius, cet I, 1987

Nasikum, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1988

Rahman Dahlan, A, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Heave, 2006

Ritzer, George, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Sarwono, Ahmad bin Zahir, *Sabda Raja HB X Dalam Timbangan Revolusi Karakter Istimewa Berdasar Yang Terlupakan : pendidikan Karakter Adiluhung Sri Sultan HB I Pesan Moral Masjid Gedhe Kraton Ngayogyakarta Figur Ideal Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015

Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1989

Sultan, Sri Hamengku Buwono X, *SABDA Ungkapan Hati Seorang Raja*, Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 2003

Thontoei, Jawahir, *Apa Istimewanya Yogya*, Yogyakarta, Pustaka Fahima, 2007 Y.

B Margantoro, *Sri Sultan Hamengku Buwono X : Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat*, Jakarta : Grasindo, 1999

Veeger, J.K., *Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993

Wagiyo, dkk, *Teori Sosiologi Modern*, Banten : Universitas Terbuka, 2012

Yuniyanto, Tri, *Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat Demokratisasi Pemerintahan Di Yogyakarta*, Solo : CakraBook, 2010

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

D. **Lain-lain**

<http://kbbi.web.id/>

<http://birokrasi.kompasiana.com/2010/12/01/suksesi-gubernur-di-monarki-jogja/>

<http://www.solopos.com/2015/05/09/sabda-raja-ini-penjelasan-lengkap-sultan-tentangsabda-raja-602606>, diakses pada tanggal 18 Desember 2015

https://id.wikipedia.org/wiki/GKR_Mangkubumi

<https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm>

<http://daerah.sindonews.com/read/1000913/189/ada-misi-pembaruan-di-balik-sabda-raja-1431517031>

<http://jogja.solopos.com/baca/2014/07/23/keistimewaan-diy-siapaakah-putra-mahkota-kraton-jogja-521367>

<http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/86470-keraton-yogayakarta-sabdatama-isu-pemimpin>

<http://www.kabarkota.com/berita-3436-apa-beda-sabdatamasabdaraja-dan-dawuhraja-sultan-hb-x.html>



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Abdul Rahim

Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 25 Februari 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : JL. MT Haryono No.52, Rt/Rw 14/05, Kel/
Suryodiningratan Kec. Mantrijeron, Yogyakarta

No. Handphone : 085647187878

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar : SD PURWODININGRATAN (1997-2003)
2. Sekolah Menengah Pertama : MA'HAD DARUL ARQOM (2004-2007)
3. Sekolah Menengah Atas : MA'HAD DARUL ARQOM (2007-2010)
4. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGAYOGYAKARTA (2011-2016)

Data Orang Tua:

1. Identitas Ayah
 - a. Nama Ayah : Ahmad Muhammad Diponegoro
 - b. Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 06 Februari 1956
 - c. Pekerjaan : Dosen
 - d. Alamat : JL. MT Haryono No.52, Rt/Rw
14/05, Kel/ Suryodiningratan Kec. Mantrijeron, Yogyakarta
2. Identitas Ibu
 - a. Nama Ibu : Darwati
 - b. Tempat/Tanggal Lahir : Lawang-Malang, 29 April 1954
 - c. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - d. Alamat : JL. MT Haryono No.52, Rt/Rw
14/05, Kel/ Suryodiningratan Kec. Mantrijeron, Yogyakarta